

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN PADA BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016)**

SKRIPSI



Oleh :

Nufairi Hatif Khairusy

14312375

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN PADA BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nufairi Hatif Khairusy

14312375

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Penulis,



(Nufairi Hatif Khairusy)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN PADA BELANJA MODAL
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

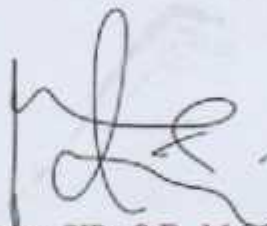
Nama: Nufairi Hatif Khairusy

No. Mahasiswa: 14312375

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA)

Disusun Oleh : **NUFAIRI HATIF KHAIRUSY**

Nomor Mahasiswa : **14312375**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Penguji : Marfuah, Dra., M.Si., Ak, Cert.SAP.

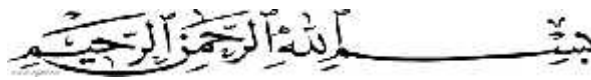


Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Srijana, SE., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2010-2016)”**. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata-1 pada program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah *Subahanahu wa Ta'ala* yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Ngesti Mastuti dan Bapak Suwandi selaku orang tua penulis, Abthal Khairusy selaku kakak penulis yang tak pernah berhenti memberikan

doa, dukungan moral dan materi, motivasi, nasehat dan bimbingan kepada penulis.

3. Chantika Dyah Putri Wulandari yang selalu memberikan semangat, arahan, dan motivasi kepada penulis ketika penulis sedang banyak pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dari awal skripsi ini dibuat hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si selaku Dekan Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran staff pengajar dan karyawan.
8. Pandu Widi Afif selaku sahabat seperjuangan penulis sejak kelas 1 SMA yang telah melewati susah dan senang bersama-sama walaupun terkadang sebagai penghambat dalam penulisan skripsi ini.
9. Rizky Sabrianto, Dean Jerry Pratama, M Zulhan, Haikal Nugraha, Deni Nurcahyo, Wawan Kurniawan, dan Anindya Karina Putri sebagai teman main penulis yang dapat meringankan pikiran ketika penulis sedang suntuk.

10. Luthfia Nur Arifah, Putri Astari, Cynthia Krisnawati, dan Tirza Silviani yang sudah membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Agung Pamungkas, Ferly Gustyo, Prastiyo, dan kawan-kawan di Solo yang telah memberikan pemikiran berbeda terhadap penulis.
12. Meizar Ferro, Wahyu Gunardianto, dan Bhayu Ajie Pamungkas teman penulis dalam mencari pundi-pundi rupiah untuk bertahan hidup di Yogyakarta.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 2018

Penulis,

(Nufairi Hatif Khairusy)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penelitian	8

BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Desentralisasi (Decentralization Theory).....	10
2.1.2. Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.3. Belanja Modal.....	11
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.5. Dana Alokasi Umum	15
2.1.6. Dana Alokasi Khusus.....	16
2.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	16
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Hipotesis Penelitian.....	24
2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	24
2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	25
2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	26
2.3.4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pengalokasian Belanja Modal	27
2.4. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	30
3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3. Variabel Penelitian.....	31
3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian	31
3.4.1. Belanja Modal.....	31
3.4.2. Pendapatan Asli Daerah.....	31
3.4.3. Dana Alokasi Umum	31
3.4.4. Dana Alokasi Khusus.....	32
3.4.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	32

3.5.1. Statistik Deskriptif	32
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.3. Analisis Regresi	34
3.5.4. Analisis Uji Hipotesis	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Data Penelitian	37
4.2. Analisis Statistika Deskriptif	38
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	40
4.3.1. Hasil Uji Normalitas	40
4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas	41
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
4.4. Hasil Pengujian Regresi Berganda.....	43
4.5. Analisis Uji Hipotesis.....	45
4.5.1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	45
4.5.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	46
4.5.3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	46
4.6. Pembahasan.....	48
4.6.1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	48
4.6.2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal	49
4.6.3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal	51
4.6.4. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal	52
BAB V.....	54
KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	56
5.3. Implikasi Praktis	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR LAMPIRAN	61
------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL 29

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 PROSES SELEKSI SAMPEL BERDASARKAN KRITERIA..	37
TABEL 4.2 STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN	38
TABEL 4.3 HASIL UJI NORMALITAS.....	41
TABEL 4.4 HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS	41
TABEL 4.5 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	42
TABEL 4.6 HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA	43
TABEL 4.7 UJI F	45
TABEL 4.8 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI	46

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR KABUPATEN DAN KOTA SAMPEL PENELITIAN.....	61
LAMPIRAN 2 : PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010-2016 (DALAM RUPIAH)	61
LAMPIRAN 3 : DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2010-2016 (DALAM RUPIAH).....	62
LAMPIRAN 4 : DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2010-2016 (DALAM RUPIAH).....	64
LAMPIRAN 5 : SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN 2010- 2016 (DALAM RUPIAH)	65
LAMPIRAN 6 : BELANJA MODAL TAHUN 2010-2016 (DALAM RUPIAH).....	66
LAMPIRAN 7 : HASIL SELEKSI SAMPEL	67
LAMPIRAN 8 : HASIL ANALISIS DESKRIPTIF	67
LAMPIRAN 9 : HASIL UJI NORMALITAS	68
LAMPIRAN 10 : HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS.....	69
LAMPIRAN 11 : HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS.....	69
LAMPIRAN 12 : HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan dampak yang banyak bagi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal sehingga diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, anggaran juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ada juga sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa

pinjaman daerah serta pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Menurut Elris (2014) Belanja Modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Prasetya, 2017). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa belanja modal ini adalah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan untuk investai permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan Pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. (Mayasari, Sinarwati, & Yuniarta, 2015).

Menurut Wertianti & Dwirandra (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Zais, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Situngkir (2009) berpendapat bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Zais, 2017). Kebutuhan pengeluaran daerah salah satunya yaitu Belanja Modal. Pemerintah Daerah dapat mengatur keuangan daerahnya sendiri akibat dari pelaksanaan desentralisasi. Kebutuhan pengeluaran daerah untuk pembangunan yang bersifat jangka panjang yaitu Belanja Modal.

Pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang (Ifa, 2017). Ini berarti Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai belanja yang bersifat jangka panjang yaitu Belanja Modal. Belanja Modal dianggap masih bergantung terhadap dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa SiLPA adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan

akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 137 menyatakan bahwa SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. SiLPA menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu, Ifa (2017) berdasarkan analisis data ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Prasetya (2017) menemukan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jemparut (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pada penelitian Zais (2017) ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Masih terdapat banyak pro dan kontra tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang Belanja Modal. Peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Belanja Modal karena Belanja Modal mempunyai efek yang besar dan jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Belanja Modal perlu dialokasikan dengan benar agar tercapainya masyarakat yang makmur dan baik secara ekonomi.

Penelitian ini akan menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal. Analisis akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D. I. Yogyakarta. Penelitian ini akan berfokus pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Peneliti menganggap faktor-faktor tersebut sangatlah penting yang merupakan sumber pembiayaan Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan melalui hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diteliti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik khususnya dalam sektor keuangan daerah serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori desentralisasi dan teori agensi. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang didasarkan pada dasar teori dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Desentralisasi (Decentralization Theory)

Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang akhirnya diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membuat perubahan politik dan administrasi yang salah satunya adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Harapannya agar tercapainya kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan ke daerah kabupaten dan kota yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Nugroho (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang

lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Sugiarthi & Supadmi, 2014).

2.1.2. Teori Keagenan (Agency Theory)

Pengelolaan keuangan sangat memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Terlebih lagi apabila terkait dengan keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan. Eksekutif yang merupakan pelaksana keuangan negara harus memberikan pertanggung jawabannya terhadap rakyat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini diperjelas dengan teori keagenan. Gaffikin (2008) menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan terdapat adanya hubungan antara pihak pemilik (prinsipal) yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan pada pihak lainnya yaitu manajemen (agen). Dalam waktu yang bersamaan kedua belah pihak akan bertindak sesuai kepentingannya masing-masing (Zais, 2017).

Dalam roda pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen yang menerima amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan dan rakyat yang diwakilkan oleh DPR bertindak sebagai prinsipal yang memiliki tugas utama mengawasi aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah (Tuasikal 2008).

2.1.3. Belanja Modal

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan pengeluaran yang telah diatur dalam APBD. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam

satu periode anggaran. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi. Merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.
2. Belanja Modal. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya.
3. Belanja Tak Terduga. Yaitu belanja tidak terduga adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah (Kusumadewi, 2007).

Menurut Elris (2014) belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Prasetya, 2017). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa belanja modal ini adalah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tuasikal (2008) mengatakan bahwa belanja modal merupakan perhatian penting dalam pengelolaan keuangan negara, hal ini disebabkan belanja modal merupakan pos yang menampilkan alokasi sumber daya keuangan yang juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Zais, 2017).

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 53 dituliskan bahwa belanja modal terdiri atas pengadaan: (1) Belanja Modal Tanah, belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yng digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan,perataan,pematangan tanah,pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan dengan perilehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi pakai; (2) Belanja Modal Peralatan Mesin, belanja Modal peralatan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengellaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (5) Belanja Modal Fisik Lainnya, belanja modal fisik Lainnya pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja moda tanah, perlatan dan mesin, gedung dan pembangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanjaini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Wertianti & Dwirandra (2013) menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Zais, 2017). UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bastin (2002) menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik

daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Jemparut, 2017).

Dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang meningkat otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Astuti, 2017). Oleh karenanya pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanjanya untuk hal-hal yang produktif.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Situngkir (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagai konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Zais, 2017).

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tertulis bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Prakosa, 2004): (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN; (2) Dana Alokasi Umum (DAU untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/ Kota di tetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas; (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten / Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten / Kota yang

ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan; (4) Porsi Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia (Jemparut, 2017).

2.1.6. Dana Alokasi Khusus

Pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang (Ifa, 2017).

Dana Alokasi Khusus juga sumber pendanaan pemerintah yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari Dana Alokasi Khusus yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya (Zais, 2017).

2.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa SiLPA adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 137 menyatakan bahwa SiLPA tahun

sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyatakan SiLPA mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	VARIABEL	HASIL	SARAN
1	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta (2014)	Variable Independen: - Pertumbuhan Ekonomi - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) Variable Dependen: - Belanja Modal.	– Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. – Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Anggaran belanja Modal. – Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.	
2	Ikhwan Prasetya (2017)	Variabel Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Belanja Pegawai Variabel Dependen: - Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: - Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, - Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, - Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh	- Peneliti selanjutnya menambah jumlah tahun yang akan diteliti. - Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti	VARIABEL	HASIL	SARAN
			<ul style="list-style-type: none"> - signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, - Dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, dan - Belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. 	<ul style="list-style-type: none"> - daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.
3	Khoirul Ifa (2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> - PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. - PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah sensus dan tahun yang digunakan agar hasil penelitian lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. - Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain baik dari APBD, PDRB, maupun variabel makro lainnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti	VARIABEL	HASIL	SARAN
			- terhadap Belanja Modal.	
4	Gogor Mustawa Zais (2017)	Variable Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Variable Dependen: - Belanja Modal	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. - Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasan penelitian yang akan dilakukan dengan cara menambahkan pembahasan kebijakan pembelanjaan, - Menambah variabel-variabel selain dari pos-pos penerimaan pendapatan yang dapat mempengaruhi kebijakan belanja modal pada suatu daerah.
5	Maria Selcindya Jemparut (2017)	Variable Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum Variable Dependen: - Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (+) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM) (+) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)	- Peneliti selanjutnya agar memperbanyak variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti pembiayaan pada APBD atas SILPA tahun sebelumnya,

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Peneliti	VARIABEL	HASIL	SARAN
				ataupun variabel-variabel Non-Keuangan; - Peneliti selanjutnya bisa menambah periode agar penelitian yang dihasilkan berbeda.
6	Novita Dwi Astuti (2017)	Variable Independen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum Variable Dependen: - Belanja Modal	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	- Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel penelitian agar hasil penelitian generalisasinya lebih luas.

Penelitian dilakukan oleh Ifa (2017) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Hasil analisis data diketahui pengujian hipotesis secara

parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, secara simultan PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Prasetya (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (*Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Zais (2017) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dari penelitian beliau adalah untuk mengetahui dan menganalisis

dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Modal (BM) di Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2010 hingga 2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014.

Jemparut (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Astuti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan Positif antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Mahargono (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PAD, DAK, dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara PAD, DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Diberlakukannya desentralisasi membuat daerah harus mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Daerah juga harus mengurus keuangannya sendiri dengan tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Tercapainya ekonomi masyarakat yang baik membutuhkan pengelolaan

keuangan yang baik dan tersedianya pelayanan publik masyarakat. Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan publik perlu mengeluarkan dana yang sifatnya jangka panjang yaitu Belanja Modal. Salah satu sumber dana untuk membiayai Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pada penelitian terdahulu, Mayasari, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbeda dengan Prasetya (2017) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Indonesia. Zais (2017) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatra Selatan. Jemparut (2017) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten atau kota Jawa Timur. Berdasarkan dasar teori diatas dan dengan didukung penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Sumber lain untuk mendanai Belanja Modal yaitu dana perimbangan yang merupakan transfer dari Pusat ke Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi

Umum merupakan transfer dana kepada setiap daerah otonom dalam setiap tahunnya guna pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dapat menaikkan Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu, Astuti (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Bengkulu. Jemparut (2017) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan Zais (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatra Selatan. Berdasarkan dasar teori diatas dan dengan didukung penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Khusus (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus juga termasuk dalam dana perimbangan yaitu transfer dana dari Pusat ke Daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ini berarti Dana Alokasi Khusus merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada penelitian terdahulu, Zais (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pada Pemerintah

Kabupaten atau Kota di Sumatra Selatan. Berbeda dengan Prasetya (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Ifa (2017) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Berdasarkan dasar teori diatas dan dengan didukung penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.3.4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pengalokasian Belanja Modal

SiLPA adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dengan kata lain, SiLPA juga merupakan sumber dana lain yang digunakan untuk membiayai Belanja Modal.

Pada penelitian terdahulu, Ifa (2017) menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun pendapat ini berbeda dengan Mahargono (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara SiLPA dengan belanja modal di Jawa Timur.

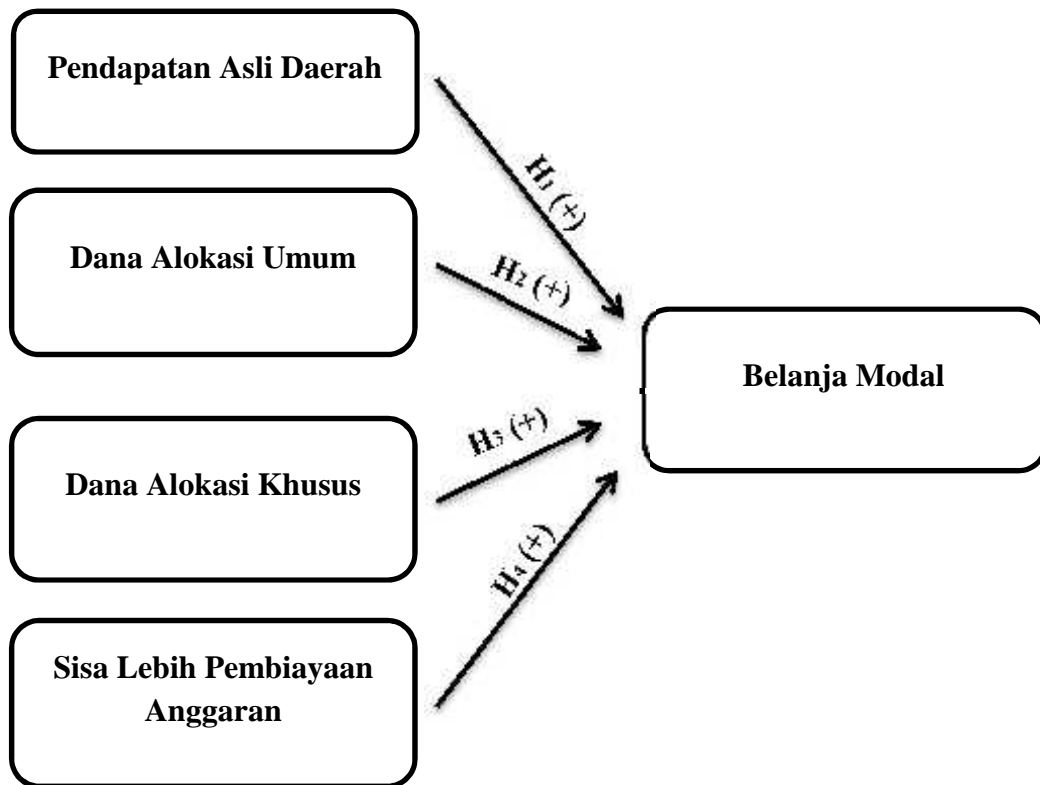
Berdasarkan dasar teori diatas dan dengan didukung penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.4. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang mempelajari suatu pengaruh, terdapat variabel penyebab (X) atau variabel bebas, variabel akibat (Y) atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu belanja modal. Berikut ini kerangka pemikiran mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Tahun pengamatan yang diambil adalah 2010-2016. Pemilihan sampel diambil dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Kabupaten / kota yang mempublikasikan data realisasi APBD yang sudah mengalami perubahan dan tersedia di internet untuk tahun anggaran 2010-2016.
- b) Kabupaten / kota di provinsi D.I.Y yang mempunyai data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal.

Setelah dilakukan penyaringan sesuai kriteria diatas, diperoleh kabupaten dan kota yang menjadi sampel berjumlah 4 kabupaten dan 1 kota.

3.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Belanja Modal yang terdapat pada laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Data diperoleh melalui situs kementria keuangan bidang Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.3. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain:

- a) Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal
- b) Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.4.1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran dalam anggaran untuk memperoleh aset tetap dan selainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran untuk variabel belanja modal menggunakan angka yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2010-2016.

3.4.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Pengukuran untuk variabel pendapatan asli daerah menggunakan angka yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2010-2016.

3.4.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagai konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Pengukuran untuk variabel pendapatan asli daerah menggunakan angka yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2010-2016.

3.4.4. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengukuran untuk variabel pendapatan asli daerah menggunakan angka yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2010-2016.

3.4.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pengukuran untuk variabel sisa lebih pembiayaan anggaran menggunakan angka yang tercantum dalam RAPBD tahun anggaran 2010-2016.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), minimum (*min*), dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten dan layak untuk penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokreditas dan data (Ghozali, 2006).

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozalli, 2005). Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai *means* sama dengan nol. Uji normalitas dapat juga dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal plot. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

3.4.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi adanya hubungan linier diantara variabel bebas dalam model regresi. Uji ini dapat dilihat dalam *Variance Inflator Factor/ Tolerance Value*. Batas dari VIF adalah 10, dan *Tolerance Value* diatas 1 maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinieritas dilakukan sebagai syarat untuk melakukan analisis regresi berganda, serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan multikolinieritas dalam persamaan regresi, dapat diketahui dengan

menggunakan toleransi variabel (*tolerance of variable*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila suatu variabel mempunyai nilai toleransi dan VIF mendekati angka 1, maka tidak ada indikasi autokorelasi dalam suatu persamaan regresi linier berganda tersebut (Ghozali, 2006).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas.

Dalam uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glejser* dimana untuk melihat terjadi heteroskedastisitas atau tidaknya dengan cara melihat nilai signifikansi (*Sig.*) pada hasil SPSS, jika *Sig.* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas namun jika *Sig.* < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Nachrowi, 2008).

3.5.3. Analisis Regresi

Alat uji regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Teknik regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel independen mempengaruhi

variabel dependen. Untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

x_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

x_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

x_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

x_4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

e = *error*

3.5.4. Analisis Uji Hipotesis

Dari analisis regresi berganda akan dianalisis menggunakan uji *Sig F*, Nilai *Adjusted R²* dan dengan uji *Sig t*.

3.4.4.1. Uji Signifikansi F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut:

- a) Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_a diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan

antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

- b) Bila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_a ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.2. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted R^2* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R^2* makin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.4.4.3. Uji t

Uji t (pengaruh secara parsial). Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Prosedur pengujian hipotesis dengan uji-t (Ghozali, 2005):

- a) Menentukan hipotesis
- b) Membandingkan probabilitas t-hitung dengan $\alpha = 5\%$
- c) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :
 - (1) H_a diterima jika $p < 0.05$
 - (2) H_a ditolak jika $p > 0.05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran pemasukan dan belanja daerah dari masing-masing kabupaten atau kota di D.I. Yogyakarta yang diambil dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten / kota yang mempublikasikan data realisasi APBD yang sudah mengalami perubahan selama tahun 2010-2016 secara berturut-urut, kabupaten / kota yang mempunyai data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal, dan kabupaten atau kota yang berada di provinsi D.I Yogyakarta. Dari hasil seleksi sampel diperoleh 4 kabupaten 1 kota.

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten / Kota yang terletak di Provinsi DIY	5
2.	Total sampel penelitian	5
3.	Total observasi penelitian (5 x 7 tahun)	35

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

4.2. Analisis Statistika Deskriptif

Pada tabel 4.1 dijelaskan mengenai karakteristik sampel penelitian terutama mengenai jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif yang diolah menggunakan program SPSS :

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	42.542.031.389	643.130.079.828	252.381.042.922	176.558.701.919
DAU	35	395.444.062.000	1.014.310.630.000	704.433.957.629	184.042.651.792
DAK	35	1.761.900.000	388.621.885.000	79.971.869.691	97.325.053.947
SiLPA	35	14.649.359.651	499.724.664.810	155.838.317.125	120.920.265.847
Belanja Modal	35	45.369.295.714	426.782.827.409	186.816.770.299	98.264.325.848

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil deskriptif pada variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 252.381.042.922 dengan standar deviasi sebesar 176.558.701.919. Nilai maksimum menunjukkan 643.130.079.828 dan nilai minimum menunjukkan 42.542.031.389. Artinya rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2016 sebesar Rp 252.381.042.922. Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Rp 643.130.079.828

pada Kabupaten Sleman tahun 2015 dan terendah yaitu Rp 42.542.031.389 pada Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010.

DAU merupakan transfer sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di dalam setiap tahunnya sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan. Berdasarkan tabel 4.1 di atas rata-rata jumlah DAU (X2) sebesar Rp 704.433.957.629 dengan jumlah DAU terendah Rp 395.444.062.000 pada Kota Yogyakarta tahun 2010 dan jumlah DAU tertinggi Rp 1.014.310.630.000 pada Kabupaten Sleman tahun 2016 dengan standar deviasi 184.042.651.792 dari rata-rata.

DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diperuntukkan untuk membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional. Jumlah DAK yang telah ditetapkan di dalam setiap tahunnya, didasarkan oleh pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan tabel 4.1 di atas rata-rata jumlah DAK (X3) sebesar Rp 79.971.869.691 dengan jumlah DAK terendah Rp 1.761.900.000 pada Kota Yogyakarta tahun 2011 dan jumlah DAK tertinggi Rp 388.621.885.000 pada Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 dengan standar deviasi 97.325.053.947 dari rata-rata.

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Berdasarkan tabel 4.1 di atas rata-rata jumlah SiLPA (X4)

sebesar Rp 155.838.317.125 dengan jumlah SiLPA terendah Rp 14.649.359.651 pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 dan jumlah SiLPA tertinggi Rp 499.724.664.810 pada Kabupaten Sleman tahun 2015 dengan standar devisiasi 120920265847 dari rata-rata

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan , maupun dalam bentuk fisik lainnya. Rata-rata jumlah belanja modal (Y) sebesar Rp 186.816.770.299 dengan jumlah belanja modal terendah Rp 45.369.295.714 pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 dan jumlah belanja modal tertinggi Rp 426.782.827.409 pada Kabupaten Sleman tahun 2015 dengan standar devisiasi 98.264.325.848 dari rata-rata.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozalli, 2005). Dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji distribusi data. Hasil uji normalitas dengan uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3. Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0.083 dan nilai signifikansi dari *unstandardized residual* sebesar 0.2 atau 20%. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 5%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* data secara umum terdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
(*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200
------------------------	------

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutt off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* = 0,10 dan nilai VIF = 10. Hasil uji multikolonieritas terdapat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95%. Hasil perhitungan untuk *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	0,249	4,013
DAU	0,519	1,928
DAK	0,526	1,900
SiLPA	0,214	4,662

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka itu yang dinamakan dengan homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan Glejser. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model regresi terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji *glejser* dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	t	Sig.
(Constant)	-0,153	0,879
PAD	-0,232	0,818
DAU	1,750	0,090
DAK	0,495	0,624
SiLPA	-0,039	0,969

a. Dependent Variable: RES_4

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas diatas 0,05. Dengan demikian model regresi ini tidak mengandung gejala Heteroskedastisitas.

4.4. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis regresi linier berganda dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 4.6 sebagai berikut

Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	-46208131562,929	32519104667	-1,421	0,166	
PAD	0,061	0,088	0,695	0,493	Tidak Signifikan, H ₁ ditolak
DAU	0,181	0,059	3,084	0,004	Signifikan, H ₂ diterima
DAK	0,408	0,110	3,708	0,001	Signifikan, H ₃ diterima
SiLPA	0,368	0,139	2,653	0,013	Signifikan, H ₄ diterima

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 hasil analisis regresi linear berganda maka didapat persamaan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = -46.208.131.562,929 + 0,061 \text{ PAD} + 0,181 \text{ DAU} + 0,408 \text{ DAK} + 0,368 \text{ SiLPA} + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta = $-46.208.131.562,929$ artinya jika variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka besarnya Belanja Modal akan berkurang sebesar Rp 46.208.131.562,92.
- b. Nilai koefisien PAD = $0,061$ artinya variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien positif terhadap belanja modal. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel PAD akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal sebesar $0,061$, begitu juga sebaliknya.
- c. Nilai koefisien DAU = $0,181$ artinya variabel dana alokasi umum mempunyai koefisien positif terhadap belanja modal. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel DAU akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal sebesar $0,181$ begitu juga sebaliknya.
- d. Nilai koefisien DAK = $0,408$ artinya variabel dana alokasi khusus mempunyai koefisien positif terhadap belanja modal. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel DAK akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal sebesar $0,408$ begitu juga sebaliknya.
- e. Nilai koefisien SiLPA = $0,368$ artinya variabel sisa lebih pembiayaan anggaran mempunyai koefisien positif terhadap belanja modal. Artinya apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap

kenaikan per satuan variabel SiLPA akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal sebesar 0,368 begitu juga sebaliknya.

4.5. Analisis Uji Hipotesis

4.5.1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan layak atau memenuhi *goodness of fit* atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2006). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7 Uji F
(ANOVA)**

Model	df	F	Sig.
Regression	4	32,414	.000
Residual	30		
Total	34		

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Hasil uji F pada tabel 4.7 diperoleh nilai F hitung adalah 32,414 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi kurang dari 5%, maka model regresi yang ada dapat dinyatakan telah layak, artinya model prediktor dengan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini layak dilakukan.

4.5.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
.901	0,812	0,787

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang digunakan dalam penelitian dalam menerangkan variabel dependen. Tabel 4.8 terlihat bahwa nilai R² sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 78,7%. Sedangkan sisanya 21,3% (100% - 78,7% = 21,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.5.3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian secara parsial atau uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis satu (H₁) sampai hipotesis empat (H₄). Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, hasil dari perbandingan probabilitas (sig-t) dengan taraf signifikan 0,05 akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tabel 4.6 yang berisi hasil persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian akan memperlihatkan hasil dari t_{hitung} yang dikeluarkan oleh output olah data dengan menggunakan *SPSS for Windows*. Dari tabel tersebut terlihat nilai *sig-t* untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai

dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya taraf signifikan 0,05.

4.5.3.1. Pengujian pada variabel PAD

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung positif 0,695 dan probabilitas sebesar 0,493 yang nilainya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya besarnya PAD yang diperoleh daerah tidak akan berpengaruh pada Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “**H1: PAD berpengaruh positif Belanja Modal**” tidak didukung.”

4.5.3.2. Pengujian pada variabel DAU

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung positif 3,084 dan probabilitas sebesar 0,004 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 diterima artinya DAU secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “**H₂: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**” didukung.

4.5.3.3. Pengujian pada variabel DAK

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t hitung positif 3,708 dan probabilitas sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka H_0 diterima artinya DAK secara parsial berpengaruh signifikan positif

terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan **“H₃: DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” didukung.**

4.5.3.4. Pengujian pada variabel SiLPA

Berdasarkan Tabel 4.6, dengan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ diperoleh t hitung positif sebesar 2,653 dan probabilitas sebesar 0,013 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dan H_a diterima artinya SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan **“H₄: SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” didukung.**

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pedapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel Belanja Modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,695 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,493 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini bisa disebabkan Pemerintah Kabupaten dan Kota lebih menggunakan sumber pemasukan lain seperti dana alokasi umum atau dana alokasi khusus untuk belanja modal. Bisa dilihat angka Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sangatlah kecil dan sumber pemasukan dari Dana Perimbangan lebih besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetya (2017) yang memberikan hasil sama. Prasetya (2017) mengatakan hal ini bisa disebabkan karena adanya nilai PAD yang rentangnya terlampau sangat jauh. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Ifa (2017) yang memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.

Pemerintah Daerah seharusnya lebih mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri dalam usahanya membangun sarana prasarana masyarakat. Semakin majunya pembangunan daerah otomatis akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah masih bergantung terhadap sumber pemasukan lain untuk membiayai pembangunannya sendiri. Pemerintah Daerah perlu menambah Pendapatan Asli Daerahnya sebagai sumber pemasukan untuk daerah. Bisa terlihat dari tahun ke tahun dari total pemasukan Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo Pendapatan Asli Daerah hanya memiliki presentase dibawah 20% saja. Penting untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo untuk menambah sarana dan prasana agar dapat menggali sumber-sumber pemasukannya sehingga tujuan dari otonomi daerah itu sendiri tercapai.

4.6.2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Untuk hasil pengujian antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan variabel belanja modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,181 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin besar nilai DAU yang diterima kabupaten/kota akan menambah belanja modal. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditujukan untuk pemerataan keuangan guna mendanai

kebutuhan daerah, ini berarti daerah masih membutuhkan DAU sebagai sumber dana untuk belanja modal guna pembangunan daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jemparut (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif pada belanja modal. Astuti (2017) juga melakukan penelitian serupa dengan hasil sama yaitu DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Zais (2017) yang mendapatkan hasil DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Zais (2017) mengungkapkan bahwa pemanfaatan secara efektif DAU dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah transfer yang dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Dalam laporan keuangan angka Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun menambah angka pendapatan Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan presentase mencapai 50% bahkan lebih. Bahkan dalam tahun 2010 mencapai angka 65% untuk daerah Kabupaten Gunung Kidul. Sumber pemasukan Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta paling besar bergantung kepada Dana Alokasi Umum. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta harus bisa memanfaatkan Dana Alokasi Umum untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri sehingga mampu menaikkan angka Pendapatan Asli Daerah yang angkanya sangatlah kecil. Dalam jangka panjang Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tidak lagi bergantung kepada Pemerintah Pusat dan mampu membiayai Belanja Modalnya sendiri.

4.6.3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan variabel Belanja Modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,408 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Belanja modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya nilai DAK. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dipergunakan untuk mendanai kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang. Sesuai dengan hasil penelitian ini berarti membuktikan bahwa DAK telah dipergunakan dengan baik untuk belanja modal.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) yang menyatakan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2017) yang menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Ifa (2017) yang mengatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Ifa (2017) mengatakan untuk membiayai belanja modal, pemerintah kabupaten dan kota menggunakan sumber pembiayaan lain dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta telah menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan tujuan dari Dana Alokasi Khusus itu sendiri yaitu untuk mendanai

kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang. Padahal jika dilihat dari laporan keuangan tahun ke tahun, jumlah Dana Alokasi Khusus tidak besar dari total Pemasukan yang diterima Pemda Kabupaten dan Kota di D.I. Yogyakarta. Proporsinya dalam Pemasukan yang diterima Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tidak lebih dari 10%, namun angka tersebut dapat mempengaruhi Belanja Modal karena penggunaannya memang ditujukan untuk belanja jangka panjang.

4.6.4. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan variabel Belanja Modal menunjukkan koefisien positif sebesar 0,368 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Artinya, dalam SiLPA terdapat pelampauan dana-dana tahun sebelumnya yang biasanya digunakan untuk membiayai belanja modal dan dari pelampauan itu digunakan untuk membiayai belanja modal tahun selanjutnya.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifa (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara SiLPA

dengan belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahargono (2017) yang menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Mahargono (2017) mengatakan SiLPA terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan apabila realisasi pendapatan di daerah lebih kecil dari anggarannya, tidak digunakan untuk membiayai belanja modal di tahun selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk belanja lain seperti Belanja Operasional. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan sumber pendapatan lain untuk Belanja Modal yaitu Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sangatlah kecil, Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih bergantung pada Pemerintah Pusat untuk Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah akan menaikkan angka Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih bergantung pada Pemerintah Pusat untuk Belanja Modal. Dengan kata lain Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam usahanya membangun

daerah. Dalam jangka panjang apabila penggunaan Dana Alokasi Umum telah efektif seharusnya Pemda Kabupaten dan Kota di D.I. Yogyakarta bisa menggali sumber pendapatannya sendiri dan tidak lagi bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan.

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini membuktikan bahwa semakin banyak Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah akan meningkatkan angka Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta. Sesuai dengan fungsi Dana Alokasi Khusus yaitu untuk mendanai kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan masyarakat yang umur ekonomisnya panjang, penelitian ini mendapatkan bukti bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuannya. Dalam jangka panjang penggunaan Dana Alokasi Khusus yang efektif seharusnya Pemda Kabupaten dan Kota di D.I. Yogyakarta sudah bisa menggali sumber pendapatannya sendiri dan tidak lagi bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini membuktikan bahwa semakin banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta. Ini disebabkan pada saat penganggaran Pemasukan jumlahnya lebih kecil

dibandingkan Realisasinya atau pada saat penganggaran Pengeluaran jumlahnya lebih besar daripada Realisasinya. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dapat membuat penganggaran yang lebih terprediksi lagi agar dapat menentukan kebijakan untuk kedepannya agar lebih baik dalam pembangunan.

5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi D. I. Yogyakarta. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi Belanja Modal namun dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, dan SiLPA.

Berdasarkan keterbatasan diatas maka ada beberapa saran yang direkomendasikan kepada penelitian yang akan datang yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang diambil sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi di D.I. Yogyakarta.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran

ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

5.3. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang berarti bagi tataran praktis, terutama Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Otonomi daerah sejatinya mempunyai tujuan agar Pemerintah Daerah dapat secara mandiri membangun Daerahnya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada Pemerintah Pusat. Desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur keuangannya sendiri.

Dilihat dari hasil penelitian yang berfokus pada Belanja Modal Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta memberikan bukti bahwa Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih bergantung kepada Dana Perimbangan untuk Belanja Modal. Hal ini bukanlah hal yang ingin dicapai dari otonomi daerah itu sendiri. Sejatinya, Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Belanja Modal. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta harus bisa menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri untuk membangun daerahnya, namun dari hasil penelitian ini terlihat Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta masih bergantung pada Dana Perimbangan antara lain Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus. Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta harus bisa memanfaatkan Dana Alokasi Umum yang

diperoleh untuk menggali sumber-sumber pendapatannya. Dalam jangka panjang apabila Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus telah digunakan secara efektif Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta telah mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatannya sendiri dan pada akhirnya menambah Pendapatan Asli Daerah dan tidak lagi bergantung pada Dana Perimbangan untuk pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (n.d.). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Bali), 1–34.
- Astuti, N. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. *Jurnal Profita*, 6.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ifa, K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa timur. *Global*, 2.
- Jemparut, M. S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Kusumadewi, D. A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Indonesia. *JAAI*, 11(1), 67–80.
- Mahargono, I. P. (2017). Pengaruh PAD, DAK dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur, 91, 399–404.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Situngkir, Anggiat. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, *Tesis* pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh Dau, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2008, hal.142-155.
- Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(32), 477–495.
- Zais, G. M. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Kabupaten dan Kota Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten / Kota
1	Kabupaten Bantul
2	Kabupaten Kulon Progo
3	Kabupaten Gunung Kidul
4	Kabupaten Sleman
5	Kota Yogyakarta

Lampiran 2 : Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bantul	2010	81,637,099,293
	2011	128,896,456,173
	2012	166,597,778,028
	2013	224,197,864,331
	2014	357,411,062,723
	2015	390,624,492,073
	2016	349,492,789,755
Kabupaten Gunung Kidul	2010	42,542,031,389
	2011	54,462,418,772
	2012	67,050,781,893
	2013	83,427,447,822
	2014	159,304,338,220
	2015	196,099,244,204
	2016	172,352,153,315

Kabupaten / Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kulon Progo	2010	48,280,640,675
	2011	53,752,293,432
	2012	74,028,663,155
	2013	95,991,512,851
	2014	158,623,927,338
	2015	170,822,326,558
	2016	172,434,611,253
Kabupaten Sleman	2010	163,056,459,138
	2011	226,723,271,088
	2012	301,069,539,284
	2013	449,270,304,865
	2014	573,337,599,560
	2015	643,130,079,828
	2016	614,410,593,300
Kota Yogyakarta	2010	179,423,640,058
	2011	228,870,559,646
	2012	338,283,728,285
	2013	383,052,140,420
	2014	470,641,528,444
	2015	510,548,522,810
	2016	503,488,602,271

Lampiran 3 : Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2016 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun	Dana Alokasi Umum
Kabupaten Bantul	2010	573,512,337,000
	2011	625,060,827,000
	2012	768,034,584,000
	2013	854,810,634,000
	2014	949,252,188,000
	2015	942,850,827,000

Kabupaten / Kota	Tahun	Dana Alokasi Umum
	2016	999,814,365,000
Kabupaten Gunung Kidul	2010	521,293,704,000
	2011	572,008,916,000
	2012	687,944,489,000
	2013	779,069,238,000
	2014	847,388,294,000
	2015	872,566,961,000
	2016	954,997,369,000
	Kabupaten Kulon Progo	2010
2011		444,043,865,000
2012		531,104,016,000
2013		779,069,238,000
2014		639,409,211,000
2015		657,260,489,000
2016		718,490,508,000
Kabupaten Sleman	2010	563,320,892,000
	2011	631,920,733,000
	2012	795,708,767,000
	2013	891,589,912,000
	2014	952,102,502,000
	2015	984,410,612,000
	2016	1,014,310,630,000
Kota Yogyakarta	2010	395,444,062,000
	2011	436,129,821,000
	2012	536,466,614,000
	2013	597,212,209,000
	2014	618,742,352,000
	2015	622,365,351,000
	2016	670,278,830,000

Lampiran 4 : Dana Alokasi Khusus Tahun 2010-2016 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun	Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Bantul	2010	60,565,500,000
	2011	45,919,200,000
	2012	63,281,450,000
	2013	47,196,880,000
	2014	60,914,370,000
	2015	72,359,660,000
	2016	119,437,060,000
Kabupaten Gunung Kidul	2010	77,574,200,000
	2011	59,156,800,000
	2012	70,584,420,000
	2013	59,793,058,000
	2014	46,172,145,000
	2015	84,971,370,000
	2016	388,621,885,000
Kabupaten Kulon Progo	2010	41,614,100,000
	2011	48,336,500,000
	2012	45,379,520,000
	2013	52,894,140,000
	2014	47,077,300,000
	2015	53,806,400,000
	2016	317,910,881,220
Kabupaten Sleman	2010	69,847,300,000
	2011	42,650,300,000
	2012	52,237,390,000
	2013	50,823,330,000
	2014	36,504,908,000
	2015	29,421,080,000
	2016	380,011,001,200
Kota Yogyakarta	2010	13,599,100,000
	2011	1,761,900,000
	2012	6,485,350,000
	2013	6,220,630,000
	2014	2,249,900,000
	2015	2,342,700,000
	2016	241,293,710,780

Lampiran 5 : Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun 2010-2016 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun	Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Bantul	2010	123,249,280,474
	2011	35,107,747,061
	2012	59,581,049,143
	2013	104,107,673,810
	2014	204,394,963,014
	2015	283,419,882,599
	2016	160,019,492,437
Kabupaten Gunung Kidul	2010	47,001,128,396
	2011	90,266,101,737
	2012	114,190,307,972
	2013	110,770,296,732
	2014	159,572,764,055
	2015	242,366,516,375
	2016	43,171,589,753
Kabupaten Kulon Progo	2010	46,582,088,894
	2011	62,690,878,554
	2012	70,769,976,974
	2013	67,374,758,024
	2014	101,472,595,620
	2015	145,587,988,986
	2016	14,649,359,651
Kabupaten Sleman	2010	99,812,269,371
	2011	111,413,870,267
	2012	138,694,508,683
	2013	289,079,874,715
	2014	431,359,469,620
	2015	499,724,664,810
	2016	154,476,387,345
Kota Yogyakarta	2010	54,040,432,205
	2011	74,972,670,064
	2012	95,445,407,302
	2013	224,522,308,350
	2014	303,377,090,557
	2015	434,397,854,728
	2016	256,677,851,091

Lampiran 6 : Belanja Modal Tahun 2010-2016 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Tahun	Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Bantul	2010	61,043,922,610
	2011	119,417,030,209
	2012	140,106,752,810
	2013	183,269,840,475
	2014	310,415,290,766
	2015	334,880,395,261
	2016	338,953,648,072
Kabupaten Gunung Kidul	2010	57,667,207,309
	2011	111,021,473,901
	2012	164,360,940,618
	2013	156,373,178,937
	2014	127,289,721,491
	2015	238,175,034,445
	2016	260,198,561,110
Kabupaten Kulon Progo	2010	45,369,295,714
	2011	105,604,886,809
	2012	147,830,580,259
	2013	123,313,526,117
	2014	146,576,953,515
	2015	226,055,713,904
	2016	307,589,295,243
Kabupaten Sleman	2010	164,125,626,537
	2011	96,111,399,135
	2012	132,536,252,044
	2013	206,859,865,136
	2014	282,862,049,259
	2015	426,782,827,409
	2016	348,203,013,231
Kota Yogyakarta	2010	98,196,733,350
	2011	59,151,111,077
	2012	88,335,891,338
	2013	167,079,742,204
	2014	193,078,279,594
	2015	256,395,156,433
	2016	313,355,764,155

Lampiran 7 : Hasil Seleksi Sampel

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten / Kota di Indonesia tahun 2018	514
2.	Kabupaten / Kota yang terletak di Provinsi DIY	5
3.	Total sampel penelitian	5
4.	Total observasi penelitian (5 x 7 tahun)	35

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Lampiran 8 : Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	42542031388,61	643130079828,03	252381042921,5120	176558701919,10300
DAU	35	395444062000,00	1014310630000,00	704433957628,5710	184042651792,28300
DAK	35	1761900000,00	388621885000,00	79971869691,4286	97325053946,64100
SiLPA	35	14649359650,54	499724664810,23	155838317124,7870	120920265847,47100
Belanja Modal	35	45369295714,46	426782827408,82	186816770299,3370	98264325847,55270

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Lampiran 9 : Hasil Uji Normalitaas

Tabel 4.3
Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000105
	Std. Deviation	42595516898,53400000
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,083
	Negative	-0,074
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Lampiran 10 : Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-46208131562,929	32519104667,992		-1,421	0,166		
	PAD	0,061	0,088	0,110	0,695	0,493	0,249	4,013
	DAU	0,181	0,059	0,339	3,084	0,004	0,519	1,928
	DAK	0,408	0,110	0,405	3,708	0,001	0,526	1,900
	SiLPA	0,368	0,139	0,453	2,653	0,013	0,214	4,662

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Lampiran 11 : Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2601604626,834	16981553245,607		-0,153	0,879	
	PAD	-0,011	0,046	-0,077	-0,232	0,818	
	DAU	0,054	0,031	0,402	1,750	0,090	
	DAK	0,028	0,058	0,113	0,495	0,624	
	SiLPA	-0,003	0,073	-0,014	-0,039	0,969	

a. Dependent Variable: RES_4

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Lampiran 12 : Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.6
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-46208131562.929	32519104667.992		-1.421	0.166
	PAD	0.061	0.088	0.110	0.695	0.493
	DAU	0.181	0.059	0.339	3.084	0.004
	DAK	0.408	0.110	0.405	3.708	0.001
	SiLPA	0.368	0.139	0.453	2.653	0.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Tabel 4.7
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26661098893030400000000,000	4	66652747232576000000000,000	32,414	.000 ^b
	Residual	61688854035012000000000,000	30	2056295134500400000000,000		
	Total	328299842965316000000000,000	34			

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

--

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	0,812	0,787	45346390534,42290

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2018